

## ABSTRAK

Salah satu kedaulatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diwujudkan dalam bentuk pengakuan atas kewenangan keistimewaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Pelaksanaan kewenangan dalam hal keistimewaan didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan berpihak pada masyarakat. Kewenangan DIY sebagai Daerah Otonom meliputi kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan fungsi keistimewaan yang diatur dalam undang-undang keistimewaan tersebut. Salah satu kewenangann keistimewaan tersebut adalah urusan pertanahan, yang seringkali menimbulkan peristiwa hukum berupa gugatan maupun sengketa.

Berbagai peristiwa hukum yang terjadi, terutama menyangkut permasalahan keberadaan tanah *Sultanaat Grond* (SG) dan *Paku Alamanaat Grond* (PAG) di Daerah Istimewa Yogyakarta ini menimbulkan kesan adanya dualisme antara pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA), dengan sistem *Apanage* yang bersifat aturan adat tradisional DIY. Hal ini memunculkan permasalahan-permasalahan yang bersumber pada kepemilikan tanah *Sultanaat Grond* (SG) dan *Paku Alamanaat Grond* (PAG) ini yang dirasakan belum berkeadilan, sehingga hal ini memerlukan suatu penegasan mengenai konsep kepemilikan tanah *Sultanaat Grond* (SG) dan *Paku Alamanaat Grond* (PAG) dalam kerangka hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan mengurai simpul-simpul kelemahan pada aspek kepemilikannya, serta kondisi ideal sistem tata kelola yang diharapkan dengan mendasarkan pada aspek historis *yuridis* sebagaimana yang seharusnya.

Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode penelitian hukum normative, yaitu dengan membandingkan perundang-undangan yang berlaku dengan permasalahan yang terkait, kemudian dengan asas-asas hukum atau doktrin yang ada, serta memperhatikan praktik yang terjadi sebagai sebuah kajian terhadap sejarah hukum. Penelitian ini bersifat eksplanatoris yang bertujuan menggambarkan secara lebih jelas dan tepat permasalahan kebijakan pengaturan yang berkaitan dengan tanah *Sultanaat Grond* (SG) dan *Paku Alamanaat Grond* (PAG) dengan beberapa variabel jejak yuridis, permalahan berupa peristiwa hukum yang terjadi, norma dan pemaknaan hukum positif serta sisi kemanfaatan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri.

Rumusan yang dihasilkan dari penelitian ini diantaranya adalah penegasan aspek kepemilikan tanah SG-PAG yang berkeadilan hukum, dengan mengurai pada kelemahan-kelemahan status tanah SG-PAG ini dari sisi struktur hukum, perilaku hukum maupun budaya hukum, yang mengarah pada tata pengelolaannya yang berkemanfaatan, serta usulan untuk menyusun formulasi rekonstruksi berupa pasal-pasal di dalam UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, baik terkait dengan kewenangan otonomi, maupun terutama pada bagian yang terkait dengan urusan pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## ABSTRACT

*One of the sovereignty of the Special Region of Yogyakarta (DIY) is manifested in the form of recognition of the privileged authority set forth in Law Number 13 of 2012 concerning the Privileges of DIY. The exercise of authority in terms of privileges is based on local wisdom values and is in favor of the community. The authority of DIY as an Autonomous Region covers the authority in the affairs of the DIY Regional Government as referred to in the Law on Regional Government and the special functions regulated in the special law. One of these privileges is land affairs, which often results in legal events in the form of lawsuits or disputes.*

*The various legal events that occurred, especially regarding the issue of the existence of the land of Sultanaat Grond (SG) and Paku Alamanaat Grond (PAG) in the Special Region of Yogyakarta, gave the impression of dualism between the enactment of Law no. 5 of 1960 (UUPA), with the Apanage system which is a DIY traditional customary rule. This raises problems that stem from the land ownership of Sultanaat Grond (SG) and Paku Alamanaat Grond (PAG) which are felt to be unfair, so this requires an affirmation of the land ownership concepts of Sultanaat Grond (SG) and Paku Alamanaat Grond (PAG). ) within the legal framework in the Special Region of Yogyakarta, by breaking down the knots of weaknesses in the aspect of ownership, as well as the ideal conditions of the expected governance system based on the juridical historical aspects as it should be.*

*This research was conducted by using normative legal research methods, namely by comparing the prevailing laws and related issues, then with existing legal principles or doctrines, and paying attention to the practices that occur as a study of legal history. This research is explanatory in nature which aims to describe more clearly and precisely the regulatory policy problems related to the land of Sultanaat Grond (SG) and Paku Alamanaat Grond (PAG) with several juridical trace variables, the problems are in the form of legal events that occur, norms and positive legal interpretations and the benefit that occurs in the community itself.*

*The formulation produced from this research includes the affirmation of the aspects of land ownership in SG-PAG which is lawful, by describing the weaknesses of SG-PAG's land status in terms of legal structure, legal behavior and legal culture, which leads to a useful management system. as well as proposals to formulate reconstruction in the form of articles in Law no. 13 of 2012 concerning the Privileges of the Special Region of Yogyakarta, both in relation to the autonomy authority, as well as especially in the section related to land affairs in the Special Region of Yogyakarta.*

**Keywords:** autonomous authority, privilege, Kasultanan, Kadipaten